

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi yang ditandai dengan adanya pemilihan umum (pemilu) yang melibatkan masyarakat untuk memilih secara langsung baik pemilihan kepala negara, kepala daerah hingga pemilihan legislatif. Hal tersebut menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menaruh kebebasan pada masyarakat dalam menentukan pemimpin baik pemimpin negara, maupun daerah sehingga memberikan warna baru untuk sistem politik di Indonesia. Demikian pentingnya hal tersebut memberikan peluang bagi warga negara Indonesia untuk dipilih dan memilih.

Pemilihan umum tahun 2004 merupakan tahun pertama dalam sejarah bangsa Indonesia melaksanakan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Pemilu secara langsung mendaulat Indonesia sebagai negara paling demokrasi ketiga di dunia setelah Amerika dan India. Pemilu tersebut juga mengakibatkan perubahan strategi dan pendekatan yang dilakukan oleh partai politik. Partai politik dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sedang dalam proses modernisasikan diri (Budiarjo, 2003).

Pelaksanaan pemilu tahun 2019 merupakan pertama kalinya dilaksanakan pemilihan legislatif dan eksekutif secara bersamaan di Indonesia. Pada Pemilu kali ini, masyarakat Indonesia diharuskan untuk memilih Presiden dan Wakil

Presiden serta anggota legislatif baik tingkat pusat ataupun daerah, yaitu memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

Setelah era reformasi, jumlah peserta yang ikut serta dalam pemilu bersifat fluktuatif. Tahun 2009 merupakan pemilu dengan peserta terbanyak, yaitu partai politik, di mana 18 di antaranya merupakan partai baru. Kemudian pada tahun 2014, terjadi penurunan yang signifikan sebesar 68% menjadi 12 partai politik. Lima tahun berikutnya, pada Pemilu 2019 terjadi peningkatan peserta sebesar 16,67% dari pemilu sebelumnya, di mana diikuti oleh 14 partai yang memenuhi syarat administrasi dan verifikasi dari 27 partai yang mendaftar. Beberapa partai politik peserta pemilu, diantaranya adalah Partai Demokrat, Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasional Demokrasi (Nasdem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). (Sumber: Komisi Pemilihan Umum, Tahun 2019)

Salah satu partai besar peserta pemilu adalah PDI-Perjuangan. PDI-Perjuangan adalah sebuah partai politik di Indonesia yang kelahirannya dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1996. Peristiwa ini merupakan awal kemunculan Megawati Soekarno Putri di panggung perpolitikan Indonesia secara nasional. PDI Perjuangan sebenarnya merupakan partai yang

mempunyai hubungan dengan partai lama ketika orde lama masih berkuasa. PDI-Perjuangan merupakan penerus dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). PDI berdiri pada tanggal 10 Januari 1973 dan merupakan hasil penggabungan dari 5 (lima) partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katholik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Murba. (*Sumber: PDI Perjuangan 2015*)

PDI-Perjuangan merupakan salah satu partai terbesar di Indonesia yang selalu meraup suara yang cukup banyak dalam setiap pemilu. Pada pemilu tahun 1999, PDI-Perjuangan mendapatkan suara yang sangat tinggi. PDI-Perjuangan berhasil memperoleh suara sebesar 33,74 % dari total suara dengan 153 kursi di DPR. (*Sumber: KPU, 2011*). Perolehan suara sebesar ini berhasil mengantarkan PDI-Perjuangan menjadi partai pemenang Pemilu pada saat itu. Kemenangan ini diperoleh karena pada saat itu PDI-Perjuangan dianggap sebagai representasi perlawanan terhadap Orde Baru yang baru saja tumbang pada tahun 1998. Pemilu 1999 juga dapat dikatakan sebagai momentum sejarah yang telah mengubah fokus dari usaha-usaha politik berubah menjadi perubahan partaipartai yang ikut serta dalam pesta demokrasi sehingga pada saat itu jumlah partai yang mengikuti pemilu tidak seperti pemilu pada masa orde baru (Djojosoekarto & Sandjaya, 2008: 34).

Dalam perjalanannya semenjak era reformasi, perolehan suara PDI-Perjuangan pada setiap pemilu mengalami pasang surut. Meskipun mendapatkan kemenangan pada pemilu 1999, namun pada pemilu 2004 PDI-Perjuangan gagal dalam mempertahankan posisinya. Pemilu 2004 merupakan

pemilu pertama untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, di mana sebelumnya Presiden dan Wakilnya dipilih oleh MPR. PDI-Perjuangan gagal mengantarkan calon Presiden yang diusungnya serta mengalami penurunan perolehan suara pada Pemilu 2004. Kegagalan PDI-Perjuangan dalam mempertahankan posisinya disebabkan oleh kegagalan PDI-Perjuangan dalam mengatasi korupsi, kolusi dan nepotisme selama partai ini berkuasa di parlemen. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat tidak puas atas kinerja PDI Perjuangan. (Sitompul 2018)

Penurunan suara PDI-Perjuangan pada Pemilu 2009 disebabkan oleh ketidak mampuan dalam meyakinkan masyarakat dan gagal menempatkan partainya sebagai partai oposisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain itu PDI-Perjuangan pada kampanye 2009 juga sempat melakukan kesalahan strategi komunikasi, yaitu dengan menjadikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai salah satu strategi kampanyenya, padahal sebelumnya PDI-Perjuangan menolak program BLT tersebut. Kemudian di dalam tubuh PDI-Perjuangan sendiri juga mengalami perpecahan pada tahun 2005 yang menyebabkan partai ini terbagi menjadi dua kubu, yaitu PDI Perjuangan dan Gerakan Pembaharuan PDI-Perjuangan (Sitompul 2008). Perpecahan ini juga menyebabkan suara pendukung partai ini tidak menyatu.

Terkait pemilihan umum 2024 mendatang, di Provinsi Lampung tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PDI-Perjuangan menurun. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PDI-Perjuangan dikarenakan pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait kenaikan harga Bahan Bakar

Minyak (BBM). Dimana kebijakan tersebut di tolak masyarakat seluruh Indonesia, penolakan juga terjadi di Provinsi Lampung di mana kebijakan tersebut akan membebani masyarakat, hal tersebut berdampak kepada PDI Perjuangan. Masyarakat berfikir kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah kebijakan presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo, yang mana Joko Widodo merupakan presiden RI yang di usung oleh PDI Perjuangan dan merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Lembaga survei Charta Politika melakukan survey di Provinsi Jawa Timur, terkait elektabilitas partai politik jelang Pemilu 2024. Tren elektabilitas PDI Perjuangan mengalami penurunan, sementara Partai Gerindra cenderung naik (*Hasil survei charta politika, 2024*). Berikut survey yang di lakukan oleh Charta Politika dengan hasil:

Tabel 1.1 Hasil Survey Charta Politika

No	Nama Partai	Perolehan Suara Menurut Survey
1	PDIP	21,4%
2	GERINDRA	14,8%
3	GOLKAR	9,3%
4	PKB	8,7%
5	PKS	7,6%
6	DEMOKRAT	6,6%
7	NASDEM	4,8%
8	PAN	2,7%
9	PPP	2,1%

10	PERINDO	2%
11	PSI	0,9%
12	PBB	0,6%
13	HANURA	0,4%
14	BURUH	0,3%
15	GARUDA	0,2%
16	PARSINDO	0,2%
17	GELORA	0,2%
18	PKN	0,1%
19	PKP	0,1%
20	TT/TJ	17,0%

Sumber: diolah peneliti, tahun 2023.

PDIP, Gerindra, dan Golkar merupakan partai politik tertinggi pilihan responden. Tren elektabilitas PDIP mengalami penurunan, pada April 2022 24,7%, Juni 2022 24,1%, dan September 21,4%. Sementara Gerindra cenderung mengalami peningkatan, pada April 2022 11,9%, Juni 2022 13,8%, dan September 14,8%. Sedangkan Golkar, pada April 2022 9,2%, Juni 2022 11,3%, dan September 9,3% (22/9/2022).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengalami penurunan tingkat kepercayaan masyarakat di Provinsi Lampung, hal tersebut dikarenakan pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dimana kebijakan tersebut sangat membebani rakyat dan

membuat rakyat tidak percaya lagi kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Sedangkan hasil survei lain yang dilakukan Litbang Kompas Oktober 2022, PDI Perjuangan dan Partai Golkar nyaris kehilangan suara pemilih generasi Z (1725 tahun). Elektabilitas Golkar di kalangan pemilih Gen Z saat ini berada di level 3,9 persen, sebelumnya pada Juni 2022 sebanyak 9,5 persen.

PDIP pada Oktober 2022 memperoleh 19 persen, yang mana sebelumnya pada Juni 2022 mendapatkan 20,4 persen. Hal serupa juga dialami PAN, pada Oktober 2022 mendapatkan 3,3 persen, padahal pada Juni 2022 memperoleh 4,4 persen. Namun, Partai Demokrat mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan. Yang mana, pada Juni 2022 mendapatkan 15 persen, dan pada Oktober 2022 meraih 18,4 persen. Tak hanya Demokrat, Partai Perindo pun memperlihatkan tren meningkat yang cukup tajam. Pada Juni 2022, Partai Pimpinan Hary Tanoesoedibjo itu hanya memperoleh 4,4 persen, namun pada Oktober 2022 mampu mendapatkan 8 persen suara pemilih generasi Z. PKS dan Partai NasDem juga mengalami tren peningkatan, yang mana PKS mendapatkan 5,6 persen sebelumnya hanya 4,1 persen. Sementara, NasDem 4,5 persen sebelumnya 3,7 persen. (Litbang Kompas: 3/11/2022)

Selain kebijakan kenaikan harga BBM penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terjadi karena pencalonan Puan Maharani sebagai presiden di tahun 2024 mendatang dimana Puan Maharani tidak meningkatkan elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Studi eksperimental yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan bahwa Puan Maharani tidak akan memiliki efek positif bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan jika dicalonkan sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Pencalonan Puan Maharani dinilai tidak memiliki pengaruh bahkan cenderung memperlemah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, maka akan memberikan efek positif terhadap suara PDI-P untuk pemilihan legislatif

Wilayah Diwek termasuk salah satu kecamatan dengan jumlah pemilih yang cukup besar di Dapil II Kabupaten Jombang, sehingga memiliki pengaruh signifikan terhadap perolehan kursi legislatif. Hal ini membuat Diwek menjadi basis suara yang strategis bagi partai politik, termasuk PDI Perjuangan. Pada Pemilu sebelumnya, wilayah Diwek sering menjadi arena persaingan sengit antar partai, karena potensi jumlah kursi yang dapat diperebutkan cukup besar. Dengan demikian, strategi PDI Perjuangan di wilayah ini penting dikaji untuk mengetahui faktor penentu keberhasilan maupun kendalanya dan Diwek dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki pondok pesantren dan lembaga pendidikan cukup banyak, sehingga pola pikir dan preferensi politik masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh tokoh agama maupun lingkungan pendidikan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik dalam meraih dukungan.

Berdasarkan paparan di atas peneliti menganggap penting untuk mengadakan suatu penelitian dengan mengangkat judul “Strategi PDI perjuangan dalam Pemenangan Pemilu di Dapil II Khususnya Wilayah Diwek”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimana Strategi partai demokrasi indonesia perjuangan dalam pemenangan pemilu di Dapil II pada tahun 2024 (studi di wilayah kecamatan diwek)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi PDI perjuangan dalam Pemenangan Pemilu di Dapil II Khususnya Wilayah Diwek

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dalam kajian ilmu politik, khususnya terkait strategi partai politik dalam pemilu.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan gambaran mengenai strategi yang digunakan PDI Perjuangan dalam memenangkan pemilu.
- b. Dapat digunakan oleh partai politik lain sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran dalam merancang strategi politik yang efektif.

- c. Memberikan rekomendasi kepada PDI Perjuangan dalam menyempurnakan strategi pemenangannya pada pemilu yang akan datang.

